

BAB V

**ANALISIS KEBERHASILAN PARA ULAMA SYI'AH
DALAM MENJATUHKAN PEMERINTAHAN
SHAH MOHAMAD REZA PAHLEVI (1941 – 1979)**

**5.1 Faktor-Faktor Keberhasilan Para Ulama Syi'ah dalam Peranannya
Mengakhiri Kekuasaan Shah Mohamad Reza Pahlevi**

Shah Mohamad Reza Pahlevi yang begitu kuat dengan sistem monarki absolut disertai dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, juga ditopang oleh SAVAK yang terkenal dengan kedzalimannya, langsung runtuh oleh gebrakan sekelompok ulama yang didukung cendekiawan dan rakyat kecil. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa para ulama Syi'ah Iran memiliki keunggulan, meskipun rata-rata dari mereka telah berusia lanjut. Berikut ini akan dipaparkan hasil analisis penulis mengenai hal-hal dibalik kesuksesan para ulama Syi'ah dalam Revolusi Islam Iran tahun 1979.

5.1.1 Ulama Memiliki Peran Penting dalam Urusan Negara

Di dalam ajaran Islam, ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Secara garis besar, peran tersebut adalah membuat pencerahan bagi umat manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai para pewaris nabi (*waratsatul anbiya*) (Q.S. Al-Jumu'ah: 2). Peran itu bisa disebut *'amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran/maksiat/keburukan). Secara rinci peran tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Mendidik umat di bidang agama serta bidang lainnya,
- b. Melakukan kontrol terhadap masyarakat,
- c. Memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat,
- d. Menjadi agen perubahan sosial.

(Fanani, 2004: 147–148).

Semua tugas tersebut harus dijalankan oleh ulama selama hidupnya, meskipun cara yang ditempuhnya berbeda.

Ulama yang hanya diam ketika terjadi kemungkarannya, menurut Al-Ghazali, dapat dikategorikan sebagai ulama *al-su'* (ulama dunia) (Fanani, 2004: 149). Ulama seperti ini biasanya bila berbicara atau mengeluarkan fatwa hanya formalitas atau basa-basi saja, agar dia tetap berpengaruh dan disegani. Ulama jenis ini, apabila berfatwa, terkadang tidak tulus dari hati nurani dan berniat membela rakyat yang tertindas. Misalnya terhadap fenomena banjir dan perdagangan wanita dan anak-anak, biasanya ulama akan diam saja. Lain halnya jika ada persoalan yang berorientasi fiqih yang menekankan pada halal atau haramnya sesuatu, para ulama akan menentang dengan semangat tinggi.

Ulama Syi'ah di Iran, pada masa Revolusi 1979, mendapat bimbingan dari Ayatullah Khomeini yang mendasarkan ajarannya pada Al-Qur'an dan hadist serta mazhab Syi'ah. Khomeini menegaskan bahwa Islam tidak bisa dilepaskan dari aktivitas politik (Enayat, 1989: 171). Islam sendiri dalam kenyataannya mengajarkan pentingnya dua hubungan, yaitu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia, agar mendapat kehidupan yang layak (Q.S. Ali Imran: 112). Hubungan manusia dengan manusia tidak akan lepas dari masalah

politik yang menyangkut pemerintahan, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, Khomeini berpendapat bahwa Islam harus membawa masyarakat agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam, maka, sudah seharusnya ulama berpolitik. Agama Islam tidak dapat dipisahkan dari politik. Para ulama harus tetap menangani agama, tetapi mereka juga harus ikut serta dalam kebijakan pemerintah di bidang sosial politik. Pemisahan agama dengan politik adalah sikap atheis. Di dalam Islam, tidak ada pemisahan antara kekuasaan agama dan dunia. Pemisahan agama dari politik bertujuan untuk memisahkan kaum ulama dari kehidupan sosial, sehingga kaum imperialis dapat menguasai kekayaan umat Islam (Mastal, 1989: 48-49).

Tujuan tersebutlah yang ingin dicapai oleh Shah Mohamad Reza, menyingkirkan dan mengasingkan kaum ulama Syi'ah dari urusan politik dan negara, sehingga ia dapat bekerja sama dengan pihak asing untuk melakukan modernisasi terhadap Iran dengan menjauhkannya dari nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, Khomeini mengajak seluruh ulama Syi'ah dan masyarakat Iran untuk mengambil peranan dalam perubahan sosial. Apalagi setelah melihat tujuan Shah Mohamad Reza, Khomeini pun menyebarkan pemikirannya tentang kesatuan agama dan negara, sehingga pemikiran inilah yang akhirnya memicu keberhasilan ulama Syi'ah dalam Revolusi 1979. Gerakan dan revolusi selamanya harus ada dalam dunia Islam, karena revolusi dapat memperbaiki penyimpangan dan menolak semua hal yang tidak bernuansa Islami.

Jika kita menghubungkan antara agama sebagai visi dan revolusi sebagai bentuk aksi (politik), keberhasilan Khomeini dan kaum ulama bukan sesuatu yang

asing. Agama menjadi landasan dan revolusi merupakan tuntutan jaman, menjadi *religion of revolution* (Maulana, 2003: 197). Para ulama mengupayakan adanya kesatuan antara filsafat yang merupakan keharusan jaman dengan syariat sebagai landasan (Iqbal, 2002). Oleh sebab itu, agama adalah revolusi itu sendiri, dan para nabi adalah kaum revolusioner.

Muthahhari pernah mengatakan:

“Faqih yang berani mengeluarkan fatwa-fatwa, berarti dia sadar bahwa para fuqaha adalah anak-anak zaman dan lingkungan mereka. Karena itu, mereka berpikir dalam batas-batas zaman dan lingkungan mereka. Kaum muslim hanya memahami sedikit dari beragam isu-isu Islam, bahwa Al-Qur’an menjadi terlihat relatif kabur di mata kita” (dalam Cottam, 1990: 201).

Faqih yang dimaksud dalam pernyataan tersebut sebenarnya adalah pemuka agama yang menjadi pengawas spiritual dalam mekanisme kenegaraan Islam. Faqih yang membimbing masyarakat yang belum mengerti benar tentang bagaimana menjadi umat Islam dan warga negara yang seharusnya. Namun, meskipun faqih merupakan pengawas spiritual dalam negara, ia tidak akan turut campur dalam seluruh kegiatan pemerintahan. Sebagai penanggung jawab tertinggi negara, ia adalah penasihat bagi kegiatan negara (Tamara, 1980: 292). Prinsip-prinsip seperti inilah yang ditanamkan Khomeini terhadap seluruh ulama Syi’ah dan masyarakat Iran untuk dapat meruntuhkan Shah Mohamad Reza, sekaligus dengan SAVAK dan pihak asing yang mendukungnya.

SAVAK yang selalu setia mendampingi Shah, juga pihak asing, terutama Amerika Serikat, pun kewalahan dengan pernyataan-pernyataan ulama menyangkut negara. Tentu saja mereka tidak dapat memandang sebelah mata kepada para ulama Iran, meskipun secara fisik, tubuh mereka telah renta termakan

usia, tetapi pemikiran mereka untuk jalannya pemerintahan Iran telah begitu meresap ke dalam diri rakyat, sampai akhirnya dapat mengobarkan revolusi. Bahkan, Mustafa Kemal Atatürk dari Turki pun cukup merasa kaget dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh para ulama Iran. Wajar saja jika penguasa Turki itu kaget dan heran, karena perlawanan yang dilakukan Shah terhadap kaum ulama bermula dari gagasan Atatürk tentang tidak perlunya ulama hadir dalam urusan negara (Sihbudi, 1996: xii).

Bukan tanpa alasan Khomeini menyatakan bahwa ulama harus menjadi pengawas spiritual dalam pemerintahan. Ia memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

1. Orang yang memerintah harus sangat mengerti tentang peraturan Islam dan adil dalam pelaksanaannya,
2. Seorang faqih adalah ahli agama, sehingga ia mempunyai wewenang yang sama dengan Rasul. Bukan sama dalam hal status, tetapi tanggung jawabnya, karena Rasul pun mengajarkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi,
3. Islam mempunyai tata tertib yang harus dilaksanakan oleh umatnya, sehingga para fuqaha sangat diperlukan keahliannya dalam persoalan hukum Islam,
4. Fuqaha melaksanakan tugas berdasarkan kewajibannya,
5. Ali bin Abi Thalib memberikan wasiat bahwa orang yang rakus dan awam tidak pantas memegang kekuasaan dan memiliki wewenang atas kehormatan, jiwa, dan kekayaan orang Islam, serta menetapkan hukum, peraturan, dan kepemimpinan atas mereka. Orang yang tidak mengerti hukum Islam akan menyesatkan umat (Sachedina, 1991).

Ulama mewarisi tugas dan wewenang para nabi. Ulama di sini maksudnya adalah para fuqaha, karena merekalah yang memahami hukum-hukum Islam dengan baik. Seorang mullah yang ditaati umat Islam adalah orang yang diamanati kepemimpinan dan pemerintahan. Seluruh urusan agama merupakan amanat Allah yang harus diserahkan pada orang yang benar-benar dapat menjaganya. Diantara amanat itu adalah pemerintahan negara. Oleh karena itu, harus berdasarkan keadilan hukum dan peraturan syari'at, sehingga pemerintahan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditolak (Fanani, 2004: 61-62). Hal-hal seperti inilah yang kurang dipahami Shah Mohamad Reza sebagai penguasa, ia terlalu tertarik dengan negara tetangganya (Turki) yang berhasil menerapkan sekulerisme, sehingga begitu bersemangat mengadopsinya untuk diterapkan di Iran, padahal Iran memiliki ulama-ulama yang mengerti bahwa negara tidak boleh dipisahkan dari peran para ulamanya.

Khomeini pernah menyatakan bahwa ia ingin memadukan ulama dengan para ilmuwan, serta ajaran Islam dengan teknologi modern (Mastal, 1989: 73). Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Khomeini dan para ulama Iran tidak akan menghalangi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Justru Khomeini dan para ulama lainnya akan menyatukan ide dan pemikiran untuk menciptakan ulama intelektual dan ilmuwan yang berpegang teguh pada agama. Selain itu, Khomeini juga tidak bermaksud mengalihkan semua tugas kenegaraan agar dilakukan oleh kaum ulama, tetapi pihak ulama maupun bukan ulama harus saling membantu dalam membimbing masyarakat. Masyarakat Iran membutuhkan politisi, ilmuwan dan ahli ekonomi yang mampu bekerja untuk kepentingan

negara, namun kaum profesional ini tidak berarti harus melupakan tugas-tugasnya sebagai bagian dari umat Islam

Mazhab Syi'ah Menjadi Sumber Keteguhan Hati Rakyat Iran dalam Revolusi 1979

Edward Mortimer menyatakan bahwa:

Ulama Sunni telah merumuskan suatu pandangan skeptis dan tidak mempercayai kekuasaan politik sejak masa awal sejarah Islam (dalam Sihbudi, 1996: 17).

Oleh karena itu, Montgomery Watt menambahkan pernyataan Mortimer bahwa meskipun Islam telah memiliki reputasi sebagai agama politik, namun Islam juga telah gagal dalam lapangan politik (Mortimer, 1984: 278-282). Di kalangan Syi'ah tidak dikenal adanya pemisahan agama dan politik (Jafri, 1989: 9). Oleh karena itu, seluruh masyarakat Iran penganut Islam Syi'ah, baik ulama maupun rakyat, merasa tidak setuju dengan tindakan Shah Mohamad Reza yang menjauhkan negara dari agama. Syi'ah menjadi mazhab yang berbeda dari garis utama (*mainstream*) pemikiran Islam. Syi'ah muncul untuk mewakili oposisi terhadap kekuasaan yang dipegang oleh mazhab utama yaitu Sunni (Shawcross, 1992: 153). Bagi rakyat Iran, Syi'ah merupakan keyakinan politik sekaligus landasan agama.

Apabila kita melihat Shah Mohamad Reza yang begitu menentang Islam Syi'ah, dan malah mengagungkan Zoroaster serta aliran-aliran nenek moyang. Berarti Shah Mohamad Reza tidak mengikuti apa yang dianut oleh dua dinasti sebelumnya, yaitu Dinasti Safawi dan Dinasti Qajar. Dinasti Safawi pada raja pertamanya Shah Ismail (1501 M – 1722 M) telah menjadikan Syi'ah Itsna

Asyariyah sebagai agama resmi negara. Pada masa Dinasti Safawi, Syi'ah dan para ulamanya mendapat tempat yang paling utama dalam pemerintahan. Dinasti Safawi juga dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di dunia yang menjadikan Syi'ah Itsna Asyariyah sebagai agama resmi negara. Selain itu, pada masa Dinasti Qajar (1796 M – 1925 M), Syi'ah bertambah kuat dengan terjunnya para ulama untuk mengobarkan semangat jihad dalam menghadapi serangan Inggris dan Rusia. Shah Mohamad Reza memang menganut Islam, namun ia lebih tertarik untuk mengembangkan budaya Zoroaster yang berasal dari nenek moyang, yaitu Dinasti Sasanid (22 M-642 M). Tentu saja hal ini yang menjadi perselisihan Shah dengan kaum ulama. Akhirnya, perselisihan ini pun menyulut revolusi.

Revolusi tahun 1979 yang mengikutsertakan ulama Syi'ah dan rakyat Iran berpedoman pada Rukun Islam Syi'ah yang ke-6. Mazhab Syi'ah memiliki delapan Rukun Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Syahadat,
2. Sholat,
3. Puasa,
4. Zakat,
5. Menunaikan ibadah haji (bagi yang mampu),
6. *Jihad fi sabilillah*,
7. *'Amar ma'ruf*,
8. *Nahi munkar*.

(Rahmat, 1992: 23).

Pada Rukun Islam yang keenam yaitu *jihad fi sabilillah*, terkandung makna bahwa seluruh penganut Syi'ah di Iran, harus terjun berjuang membela agama dari tuduhan-tuduhan negatif serta penyimpangan-penyimpangan dari jalur yang seharusnya. Semua rakyat Iran harus berani mengorbankan apapun juga, harta, keluarga, bahkan nyawa, karena pasti akan syahid sebagai syuhada dan tanpa rintangan langsung menempati surga abadi Allah SWT, seperti yang telah dialami Imam Husain yang mati syahid di Karbala/Nainawa karena membela agama Allah.

Syi'ah di Iran yang sebenarnya, menjadikan Islam sebagai ideologi, dan itu dapat terwujud oleh suatu negara Islam. Negara Islam dapat dibentuk karena adanya suatu revolusi. Revolusi yang dilakukan tentunya bersifat politis dan membutuhkan kekuatan serta tegas dan tanpa pamrih. Revolusi seperti inilah yang dilakukan oleh ulama dan orang-orang tertindas di Iran. Memang terkesan keras dan tegas, namun ketegasan umat Syi'ah Iran inilah yang telah menciutkan nyali Shah Mohamad Reza yang dikenal kuat, tegas, dan keras bersama SAVAK-nya. Selain itu, Khomeini pun memandang bahwa umat Islam pada masa itu telah memiliki kekuatan baik dalam bentuk harta, jumlah orang, tekad, maupun aqidah, yang bisa digunakan untuk menekan rezim Shah. Oleh karena itu, Khomeini terus-menerus menyerukan agar umat Islam melakukan konsolidasi dan kesatuan potensi untuk melepaskan diri dari belenggu penguasa yang diktator (Mastal, 1989: 55).

Pemisahan Syi'ah dan pemerintahan telah ditanamkan ke dalam diri kaum muslim Iran oleh rezim Shah Pahlevi agar tidak mendukung perjuangan kaum

ulama (Curtis, 1988: 150). Pemikiran seperti ini segera diklarifikasi oleh para ulama Syi'ah, bahwa Syi'ah Imamah (Itsna Asyariyah) yang dianut rakyat Iran merupakan perpaduan agama dan politik yang tugasnya diserahkan kepada faqih (ahli hukum Islam). Pernyataan kaum ulama inilah yang pada akhirnya mengokohkan keyakinan rakyat Iran untuk berada di belakang kaum ulama dalam berjuang menjatuhkan Shah Mohamad Reza.

Permusuhan kaum ulama dengan Shah Mohamad Reza sebenarnya berlandaskan pada buku Ayatullah Khomeini yang berjudul "*Hukuma-i Islami: Vilayat-i Faqih*", yang mengatakan bahwa negara yang bersatu dengan agama akan lebih mudah mencapai tujuan yang dikehendaki. Khomeini berpendapat bahwa orang-orang yang ingin menghilangkan kekuasaan negara dari agama adalah 'pengkhianat besar negara', karena suatu negara akan hancur jika telah memiliki hukum Tuhan, namun masih saja mencari dan menggunakan hukum dari negara asing (Bakhash, 1989: 38-40).

Para penganut Syi'ah di Iran pun dalam menyusun suatu revolusi agar dapat menumbangkan Shah Mohamad Reza berpedoman pada pemikiran Farid Esack tentang kunci-kunci revolusi dan pembebasan, yakni:

1. *Taqwa*, meliputi tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Manusia memikul tugas kenabian dalam transformasi dan revolusi,
2. *Tauhid*, kesatuan Tuhan untuk kesatuan manusia. Tauhid adalah fondasi, pusat, dan tujuan dari keseluruhan tradisi Islam. Tauhid merupakan jantung pandangan sosial politik dan tumbuh secara meyakinkan dalam Revolusi Iran 1979. Ali Syari'ati adalah cendekiawan yang menyatakan bahwa tauhid

merupakan pandangan dunia yang bertujuan merealisasikan kesatuan Tuhan dalam hubungan manusia dan sosial ekonomi. Tauhid digunakan untuk melawan pemisahan antara agama dan politik. Tauhid adalah sumber ideologi dan kerangka rujukan suci,

3. *Al-Nas*, manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Paham kemanusiaan mempunyai dua implikasi masalah teologis, yaitu:
 - a. Rakyat sebagai ukuran kebenaran, ulama merupakan suatu kebenaran yang identik dengan kebenaran Tuhan,
 - b. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan suatu kebenaran.
4. *Al-Mustad'afun, fuqara, masakin, dan aradbil* merupakan kelas marginal dan tertindas. Lawan dari keempatnya adalah *mutrafun, mala', dan mustakbirun*. Rasulullah berasal dari keluarga petani dan kelas pekerja. Mereka menghapuskan ketidakadilan sosial ekonomi. Al-Qur'an melarang penimbunan kekayaan, penindasan terhadap wanita, anak-anak, dan rakyat kecil,
5. *'Adlu dan Qisti*. Keadilan dibangun berdasarkan tauhid dan jalan menuju taqwa. Keadilan merupakan landasan bagi tegaknya agama. Umat Islam diharapkan dapat berpegang pada keadilan sebagai dasar kehidupan sosial ekonomi. Keadilan adalah ukuran untuk melakukan revolusi,
6. *Jihad* adalah perjuangan dan tindakan sadar manusia yang memiliki tanggung jawab atas determinasi politik yang didasarkan realisasi bahwa manusia menciptakan sejarah (Chopp, 1989: 137). Di Iran, jihad merupakan paradigma

perjuangan pembebasan dalam Islam. *Jihad* di jalan Allah adalah bagian dari iman, *jihad* untuk kebebasan dan keadilan adalah suci.

(Esack, 1997: 83-84).

Pemikiran Esack tersebut senada dengan pernyataan yang dikemukakan Khomeini bahwa keenam unsur yang telah disebutkan Esack itu merupakan bagian terpenting dalam keislaman karena perbandingan ayat yang berhubungan dengan ibadah dan kemasyarakatan adalah satu berbanding seratus ayat. Oleh sebab itu, kepemimpinan menjadi bagian penting dalam upaya menata kehidupan masyarakat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist (Maulana, 2003: 124). Esack mengemukakan kunci keberhasilan revolusi dalam enam unsur, sedangkan Khomeini menyatakannya dalam tiga unsur, namun ketiganya telah mencakup keseluruhan pernyataan Esack, yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan (imamah), merupakan salah satu rukun iman dalam pandangan Syi'ah, disamping keimanan terhadap Allah (*tauhid*), kenabian (*nubuwah*), keadilan (*'adalah*), dan keyakinan terhadap hari akhir (*al-wa'ad*),
2. Kesyahidan (syahadah, *martyrdom*, pengorbanan) merupakan landasan dalam upaya kematian di jalan Allah, seperti Al-Husain yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dalam peristiwa Karbala pada tanggal 10 Muharram beserta 72 orang pengikutnya. Disinilah revolusi berawal, dengan runtuhnya tirani. Bagi Khomeini dan pengikutnya, tragedi Karbala dinyatakan sebagai sesuatu yang wajar dan memang seharusnya, bukan peristiwa yang mustahil dan sulit ditiru,
3. Pembelaan terhadap kaum tertindas (*mustadl'afin*) dari tindakan kaum penindas (*mustakbirin*), untuk mewujudkan suatu negara atau pemerintahan

yang berkeadilan bagi seluruh manusia umumnya, dan umat Islam khususnya (Enayat, 1988: 301–302).

Akibat Runtuhnya Kekuasaan Shah Mohamad Reza Pahlevi oleh Para Ulama Syi'ah

Keberhasilan para ulama Syi'ah telah menimbulkan akibat bagi pemerintahan di Iran setelah kepergian Shah Mohamad Reza Pahlevi ke negeri asing. Pada bagian ini akan dibahas akibat yang timbul disertai pula dengan tinjauan dari penulis sendiri. Berikut ini hasil analisis penulis mengenai akibat dan tinjauan keberhasilan para ulama Syi'ah tersebut.

5.2.1 Ulama Syi'ah Semakin Jauh dari Cita-Cita Revolusi Islam Iran 1979

Jatuhnya pemerintahan Shah Mohamad Reza pada tahun 1979 telah mendorong kaum ulama Syi'ah untuk memimpin urusan negara, sehingga tampuk politik Iran berada di tangan para mullah. Maka, dapat dikatakan bahwa para ulama ini telah menyimpang dari tujuan semula yang akan menempati posisi sebagai pemimpin spiritual dalam pemerintahan (Labib dkk, 2006: 31). Selain itu, muncul pertentangan antar sesama ulama Syi'ah mengenai urusan pemerintahan. Para ulama itu terbagi ke dalam dua kelompok besar, sebagai berikut:

1. Para ulama senior yang tergabung dalam *Jome'eye Rohaniyyat-e-Mobarez* (Asosiasi Keulamaan Militan). Kelompok ini beranggotakan ulama-ulama senior dan berpengaruh, seperti: Murtada Muthahhari, Bahesyti, Mahdavi Kani, Rafsanjani, Ali Khamenei, Javad Bahonar, Nateq Nouri, Tharel Khorram Abadi, Mahmoud Taleqani, Musawi Ardabili, Yusef Shanei, dan Thaheri Esfahani. Kelompok ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip

hukum positif yang didasarkan pada syari'at, dengan tetap menjaga jarak dengan aspirasi dan kecenderungan sosial, yang pada waktu itu merupakan persoalan rumit,

2. Kelompok ulama muda yang banyak mengadopsi pemikiran sosialis, nasionalis, dan liberalis. Mereka tergabung dalam *Majmal-e-Ruhiyyun-e-Mobarez-e-Teheran*. Para ulama muda ini terdiri dari: Mohamad Montazeri, Mosawi Kha'eniha, Hadi Khamenei, Mohamad Khatami, Ahmad Khomeini, Mehdi Karrubi, Mohamad Mohtasyami, dan Majid Ansari. (Labib dkk, 2006: 31-32).

Perbedaan pemikiran dua kelompok ulama ini, terutama dalam penentuan status aset kroni Shah Mohamad Reza yang telah keluar dari Iran. Kalangan ulama muda menghendaki penyitaan dan nasionalisasi aset tersebut, sedangkan kaum ulama senior menentang keinginan ulama muda, karena tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Di bidang politik, kaum ulama senior menekankan ketaatan pada Khomeini sebagai pemimpin dan melarang kaum muda untuk mengekspos revolusi. Sebaliknya, ulama muda menginginkan kepemimpinan ulama tidak terfokus pada Khomeini saja, serta kaum muda ini amat bersemangat untuk berkampanye tentang Revolusi Iran ke berbagai tempat dan mencegah kelompok-kelompok yang kontra terhadap revolusi (Labib dkk, 2006: 34).

Pada awal pemerintahan, kedua kelompok ini perlahan-lahan mulai menempati posisi dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Jabatan mereka adalah sebagai berikut:

a. Kalangan ulama senior:

- Rafsanjani berada di lembaga legislatif,
- Musawi Ardabili di lembaga yudikatif,
- Ali Khamenei di lembaga eksekutif.

b. Kalangan ulama muda:

- Husein Musawi memegang kabinet,
- Luthfullah Shafi memegang Dewan Garda.

(Labib dkk, 2006: 37).

Kedua kelompok ulama ini pada awal menempati posisinya terlihat harmonis, tetapi lama-kelamaan lembaga legislatif yang dikuasai ulama senior dan Dewan Garda yang dipegang oleh ulama muda berseteru seputar masalah-masalah kenegaraan dan jarang mencapai kata sepakat.

Selain itu, kaum ulama senior yang pada awalnya mengayomi dan membimbing rakyat, setelah berada di kursi pemerintahan mulai menyalahgunakan konsep *Vilayat-i Faqih*. Mereka mulai memecat dan menjatuhkan orang-orang yang justru sangat didukung oleh rakyat, pencoretan anggota legislatif dari kalangan ulama muda, serta melarang aksi protes mahasiswa, bahkan lama-kelamaan membelenggu kebebasan pers. Tentu saja, semua tindakan itu telah membelokkan tujuan dan harapan revolusi yang sebenarnya (Fanani, 2004: 150). Para ulama tersebut pada akhirnya hanya memanfaatkan wibawa dan kedudukannya untuk memenuhi keinginan pribadi dan kelompoknya.

Para ulama yang mencalonkan diri untuk menempati posisi di lembaga legislatif lalu berkampanye besar-besaran, ketika dirinya terpilih pada akhirnya hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak diperlukan atau membuat rakyat marah, misalnya pengusiran Abolhassan Bani Sadr yang begitu didukung rakyat. Penulis beranggapan hal ini senada dengan peristiwa yang baru saja terjadi di Indonesia, yaitu pembagian laptop bagi para anggota legislatif, padahal hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat penting. Ada salah seorang anggota legislatif yang menyatakan bahwa laptop merupakan kebutuhan teknologi yang sangat mendesak untuk dipenuhi pada saat sekarang bagi para wakil rakyat untuk memperlancar kinerjanya.

Sebagai orang-orang yang mewarisi tugas para nabi dan memiliki wibawa dalam masyarakat, para ulama Syi'ah Iran seharusnya dapat dijadikan figur moral, panutan rakyat, memiliki watak sosial, serta menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari (Fanani, 2004: 151-152). Jika sudah seperti itu, para ulama akan benar-benar membuat rakyat merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya sebagai warga negara. Seorang mahasiswa dari Universitas Teheran bernama Mahmoud Ahmadinejad (sekarang menjadi presiden Iran yang keenam) pernah mengatakan:

“Rakyat menjadi semakin apatis melihat orang-orang elit bersorban (ulama) yang begitu dibanggakan, kini malah menikmati kekuasaan dan melupakan bahwa perjuangan mereka adalah untuk rakyat kecil” (dalam Labib dkk, 2006: 151).

Ahmadinejad seorang pemuda dan mahasiswa yang pada waktu itu menyaksikan sendiri cita-cita Revolusi 1979 semakin jauh dari jalur yang sebenarnya. Rakyat telah dibuat kecewa dengan perilaku para mullah yang mereka harapkan dapat

memperbaiki keadaan labil dan hancur pada waktu Shah Mohamad Reza masih berkuasa.

Dalam Revolusi 1979 itu, kaum ulama telah 'memakan anak sendiri'. Maksudnya adalah bahwa setahun setelah peristiwa revolusi itu terjadi (tahun 1980), para ulama mulai menyingkirkan lawan-lawan politik mereka, seperti Bahesyti, Rajai, dan terakhir pada bulan Juni 1981, Abolhassan Bani Sadr dipaksa turun dari jabatan sebagai presiden. Kaum ulama itu diperkirakan mendapat perintah dari Khomeini untuk menyingkirkan tiga orang tersebut, yang justru mendapat simpati dari rakyat. Bahkan, Khomeini pernah mengancam akan membunuh Bani Sadr karena dialah orang berpaham nasionalis liberal yang sering mengkritik *Vilayat -i Faqih* yang merupakan gagasan Khomeini. Oleh sebab itu, terpaksa Bani Sadr pergi ke luar negeri dengan mengenakan pakaian wanita bercadar agar tidak diketahui identitasnya saat pemeriksaan di lapangan terbang (<http://www.ummahonline.com/index/modules.php?name=News&file=article&sid=499>). Selain itu, terjadi pula pengucilan terhadap penduduk Iran yang bermazhab Sunni yang berjumlah sekitar 10 persen dari seluruh rakyat Iran. Padahal, pada waktu revolusi terjadi, Khomeini mengatakan bahwa orang-orang Syi'ah dan Sunni harus hidup rukun dan berada dalam satu naungan agama Islam.

5.2.2 Tinjauan Tentang Akibat Keruntuhan Shah Mohamad Reza oleh Para Ulama Syi'ah

Revolusi adalah perubahan radikal dan fundamental dalam tata kehidupan masyarakat secara cepat (Musa Asy'arie dalam Sarbini, 2005: x). Revolusi pada umumnya ditandai dengan penggulingan kekuasaan dan sering terjadi aksi

berdarah sebagai akibat dari kerasnya konflik yang ditimbulkan oleh dua kekuatan yang mencoba untuk saling menjatuhkan. Bila kita pikirkan lebih dalam, sebenarnya revolusi sangat bermanfaat untuk menghidupkan dinamika masyarakat untuk membangun peradaban baru, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, agama, kebudayaan, maupun teknologi.

Bagi suatu masyarakat yang tata dan sistem politiknya telah mapan, revolusi berlangsung dalam tatanan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Lain halnya bagi masyarakat yang tata dan sistem politiknya belum stabil, revolusi menjadi sesuatu yang begitu menegangkan, memiliki banyak tujuan ideal, dan merupakan pembaharuan besar-besaran (Syari'ati, 2001: 16). Itulah revolusi yang terjadi di Iran tahun 1979, begitu tegang, ingin mencapai tujuan-tujuan ideal, serta merupakan pembaharuan besar-besaran yang menembus sampai ke seluruh dunia. Revolusi Iran saat itu terasa tegang karena perselisihan dua kekuatan: kekuatan rezim Shah Mohamad Reza Pahlevi dan kekuatan para ulama Syi'ah yang didukung oleh berbagai kalangan masyarakat Iran, dari mulai mahasiswa, pedagang, wartawan, kalangan profesi (guru, dokter, arsitek), hingga buruh kasar dan rakyat kecil. Revolusi ini pun memiliki tujuan-tujuan ideal seperti yang telah dikemukakan oleh Khomeini, yaitu: mendirikan negara Islam yang bebas dari campur tangan pihak asing, menciptakan pemerintahan bernuansa Islami dengan kaum ulama sebagai pengawas dan penasihat spiritual, serta memperbaiki aspek-aspek kehidupan rakyat di segala bidang. Revolusi Islam Iran telah tersebar ke seluruh dunia yang cukup membuat tersentak, karena Shah Mohamad Reza begitu mudahnya dihancurkan oleh sekelompok orang yang telah berusia tua.

Ali Syari'ati mengatakan bahwa Islam yang murni belum dikuasai ulama konservatif, sehingga Islam yang sebenarnya sebagai ideologi revolusioner merupakan pembebasan dari penjajahan politik, ekonomi, dan kultur Barat (Azra, 1996: 90). Oleh karena itu, negara seperti Iran memerlukan revolusi yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:

1. Revolusi nasional yang tujuannya bukan hanya untuk mengakhiri seluruh bentuk dominasi Barat, tetapi juga untuk memperbaiki kebudayaan dan identitas nasional negara dunia ketiga,
2. Revolusi sosial untuk menghapus berbagai macam eksploitasi dan kemiskinan untuk menciptakan masyarakat adil, dinamis, dan tidak ada perbedaan kelas (diskriminasi) (Engineer, 2003: 42).

Pembaharuan yang dimaksud dalam Revolusi Iran adalah sebagai berikut:

1. Untuk membebaskan dan membimbing rakyat,
2. Untuk menciptakan cinta dan keyakinan baru, serta memberi kesadaran baru dalam hati dan pikiran rakyat,
3. Untuk mengingatkan mereka tentang berbagai bahaya yang mungkin muncul akibat unsur kebodohan, kejahatan, kemiskinan, dan kebobrokan masyarakat Islam (Ali Syari'ati dalam Esposito, 1989: 88).

Pada masa awal revolusi, tentu saja rakyat Iran begitu merasakan apa yang tercantum dalam ketiga tujuan di atas. Rakyat merasa terbebas dari belenggu monarki, merasa terlindungi, yakin dengan revolusi, serta kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya yang bisa muncul kapan saja.

Apakah ketiga hal tersebut dirasakan rakyat terus-menerus?. Pada saat para ulama telah mulai memasuki lembaga-lembaga pemerintahan, rakyat harus kecewa, karena sang pengayom berubah haluan, lebih menyukai dunia politik daripada dunia Islam yang harus mereka terjuni demi ketenteraman negara. Bahkan, masa pasca-revolusi tahun 1981, malah terjadi bentrokan antara orang-orang penganut Syi'ah dan Sunni. Namun, sepertinya para ulama tidak memperhatikan hal ini.

Pada saat itu, justru rakyat mulai agak mengeluh, mereka mulai membandingkan pemerintahan Republik Islam Iran dengan pemerintahan monarki pada saat Shah Mohamad Reza masih berkuasa. Mereka membandingkan bahwa dari segi ekonomi dan keamanan masih lebih baik pada jaman Shah, meskipun Shah seorang diktator. Apabila penulis analisis, hal tersebut senada dengan situasi Indonesia pada saat mulai memasuki jaman Orde Reformasi. Orde Reformasi, menurut rakyat, malah memperburuk keadaan, harga barang-barang kebutuhan pokok naik begitu tinggi, kriminalitas pun meningkat drastis, karena orang awam salah persepsi tentang Orde Reformasi. Orde Reformasi oleh sebagian orang diartikan sebagai saat paling tepat untuk melakukan apapun dengan sebebas-bebasnya. Rakyat mulai menyesalkan kejatuhan rezim Orde Baru, karena waktu Orde Baru masih berkuasa, harga barang-barang kebutuhan pokok sangat murah, karena bagi rakyat jika masalah "perut" terpenuhi dengan mudah, maka dengan mudah pula mereka akan menyanjung rezim yang sedang berkuasa. Selain itu, pada masa Orde Baru, keamanan negara terjamin dan jarang ada teror bom dan

pemboman, juga negara-negara lain tidak sewenang-wenang merebut batas-batas dan kepulauan Indonesia.

Oleh sebab itu, Mahmoud Ahmadinejad menyatakan keprihatinannya tentang jalan lurus Revolusi Iran 1979 yang telah berbelok arah dari jalur yang sebenarnya, simfoni sorban putih telah berubah menjadi drama sorban hitam (Labib dkk, 2006: 155). Ahmadinejad ingin mengembalikan nuansa Revolusi Iran 1979. Revolusi 1979 itu harus benar-benar dijalankan secara murni, bukan hanya dijadikan senjata untuk memperkuat kekuasaan. Kebebasan, demokrasi, kemajuan, dan keagamaan, menurut Ahmadinejad, masih menjadi slogan-slogan yang tidak memiliki arti apa-apa. Cita-cita Revolusi Islam Iran 1979 harus benar-benar dibangkitkan kembali dalam rangka menyiapkan Iran yang kokoh di tengah persaingan negara-negara dunia ketiga (Labib dkk, 2006: 158). Musa Asy'arie dalam Sarbini (2005: xiii) menyatakan:

“Tuntutan revolusi semakin nyaring terdengar dimana-mana dengan semakin terpuruknya kehidupan rakyat. Revolusi diyakini dapat menjadi jalan untuk melakukan lompatan sejarah peradaban suatu bangsa”.

Revolusi Islam Iran melahirkan keterkaitan antara Iran dengan institusi Islam, bahkan hal tersebut merupakan suatu peristiwa terbesar dalam seluruh sejarah masyarakat Islam. Pola hubungan negara dan ulama dalam sejarah Iran menjadi renggang sejak rezim Pahlevi berkuasa. Para ulama menunjukkan sikap revolusioner, namun terkadang juga bersikap pasif dalam urusan negara dan agama. Perjuangan Husain bin Ali yang teguh mempertahankan Islam menjadi pedoman kuat pada masa revolusi, namun menjadi pudar setelah revolusi mencapai tujuan yang diinginkan.